



DATAn
make it matters

OOOOO

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, JEMBATAN KELUAR DARI JERAT KELAS MENENGAH

IKHTISAR

- Tiga dekade Indonesia terjatuh pada kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah.
- Besarnya populasi penduduk kelas menengah di Indonesia didorong oleh pesatnya proses transformasi struktural. Namun, transformasi struktural sepertinya belum dapat menjamin sepenuhnya kesejahteraan kelompok berpendapatan menengah bawah.
- Kelompok berpendapatan menengah bawah di Indonesia tercatat masih kesulitan menikmati akses pendidikan dan teknologi, kesehatan, perlindungan sosial maupun jaminan pekerjaan.
- Kualitas SDM adalah kunci dalam upaya keluar dari belenggu kelas menengah. Ditambah lagi, Indonesia sedang mengalami kondisi bonus demografi dimana hal ini merupakan peluang jika dapat dikelola dengan baik.
- Percepatan pembangunan infrastruktur pada aspek pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas dan akses ke kedua aspek tersebut menjadi hal yang esensial untuk keluar dari jerat kelas menengah.
- Provinsi-provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia adalah provinsi yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur regional karena jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar per desa di provinsi-provinsi tersebut masih di bawah rata-rata nasional jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan per desa.

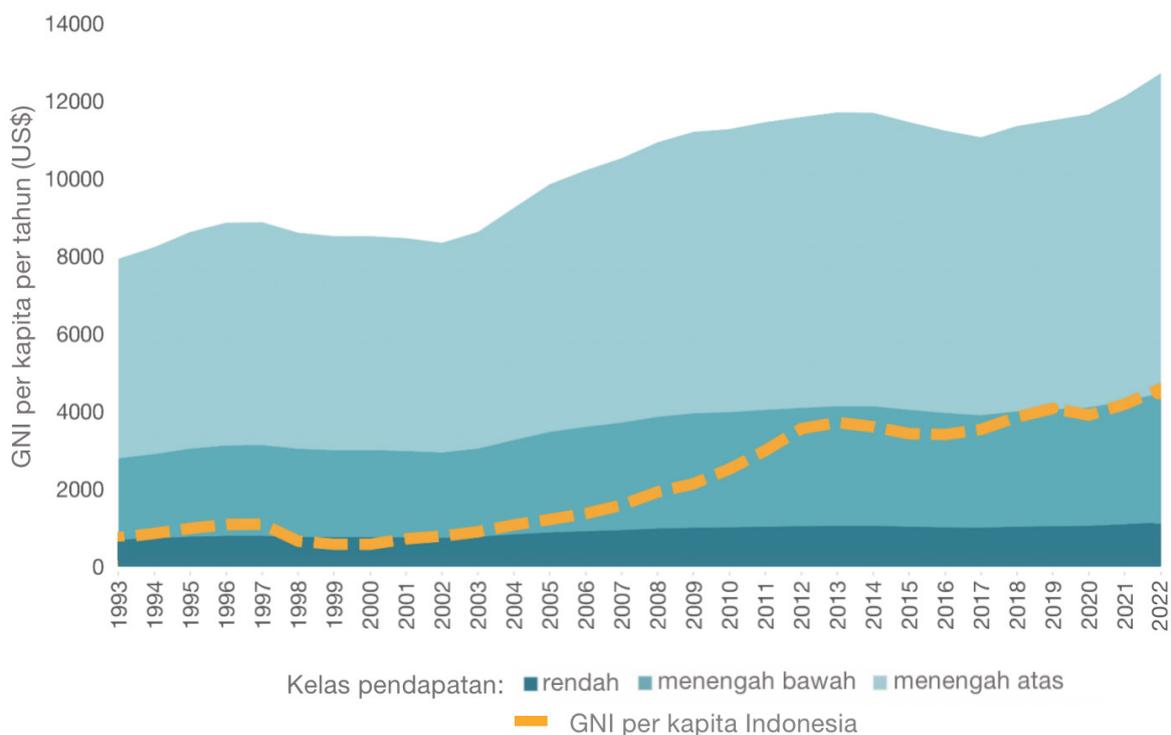


Tiga Dekade Terbelenggu di Kelas Menengah

Istilah negara kelas menengah pertama kali dipopulerkan oleh *World Bank*. *World Bank* berinisiatif melakukan berbagai analisis terkait pembangunan negara-negara di dunia berdasarkan kelas pendapatannya. Indikator yang dipakai adalah pendapatan nasional bruto (*gross national income* – GNI) per kapita per tahun dalam satuan dolar Amerika. Selanjutnya *World Bank* mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi empat kelas, yaitu negara berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah atas, negara berpendapatan menengah bawah, dan negara berpendapatan rendah [1]. Pengelompokan negara ini dimulai sekitar 34 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1989. Terdapat dua ketentuan yang digunakan untuk menentukan batas pendapatan setiap kelas. Pertama adalah batasan operasional dari “*civil works preference*” untuk kelas berpendapatan rendah dan

kedua adalah ketentuan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* – yang adalah *World Bank* pada masa itu – untuk kelas lainnya [2]. Batas setiap kelas ini diperbaharui oleh *World Bank* dengan penyesuaian menurut tingkat inflasi pada setiap tahunnya.

Pengelompokan negara yang semula ditujukan *World Bank* untuk keperluan analisis ternyata mendapatkan atensi yang cukup besar dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, para pembuat kebijakan, akademisi sampai dengan komunitas bisnis dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Beberapa diantaranya adalah sebagai landasan dalam menetapkan aturan perdagangan antar negara, sumber informasi untuk melihat tren pembangunan, dan pedoman bagi pemerintah untuk menetapkan target peningkatan “status” negara. Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar US\$ 4.580. Kondisi ini naik dari tahun 2021 dimana



Sumber : The World Bank

Gambar 1 GNI per kapita Indonesia dan kelas pendapatan tahun 2000-2022

pendapatan perkapita kita kala itu sebesar US\$ 4.140. Di sisi lain, batas pendapatan negara kelompok pendapatan tinggi adalah US\$ 13.845. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan perkapita sebanyak tiga kali lipat untuk dapat naik “status” menjadi negara berpendapatan tinggi [3].

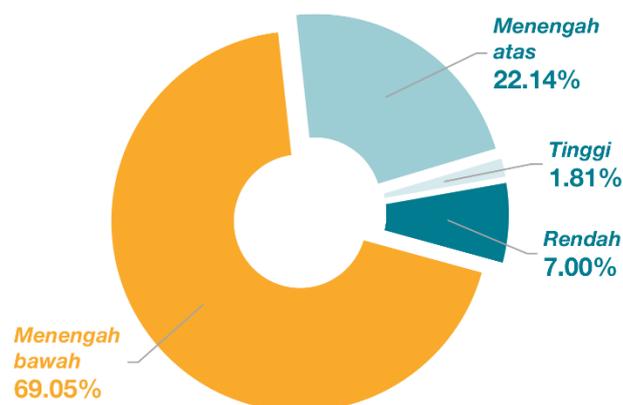
Gambar 1 menyajikan secara jelas tren pendapatan perkapita Indonesia. Setidaknya, sudah hampir tiga dekade Indonesia bertahan pada kelas menengah ke bawah. Indonesia menjadi kelompok kelas menengah bawah pada tahun 1993 kemudian turun menjadi kelas berpendapatan rendah pada era krisis 1998. Namun Indonesia dapat kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah pada awal tahun 2000. Hampir 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, Indonesia berhasil menjadi negara berpendapatan menengah atas. Namun demikian, kondisi ini tidak berlangsung lama. Pandemi COVID-19 menjadi hambatan dan menyebabkan Indonesia kembali terjebak pada kelas menengah bawah hingga tahun 2021. di tahun 2022, Indonesia dapat kembali masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Gambar 1). Meski demikian, terlihat bahwa Indonesia masih kesulitan dan perlu *effort* yang besar untuk bertahan di kelas menengah atas. Hal ini tampak dari sisi pendapatan perkapita Indonesia yang berada pada ambang batas bawah kelas pendapatan menengah atas.

Indonesia sebetulnya memiliki potensi untuk keluar dari jerat kelas menengah. Saat ini Indonesia sedang menikmati suatu kondisi yang disebut *bonus demografi* karena memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup

besar. Besarnya jumlah penduduk produktif diketahui memiliki hubungan positif dengan besarnya nilai PDB [4]. Jumlah penduduk produktif jika diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi salah satu kunci dalam upaya keluar dari jerat kelas menengah [5]. Oleh karena itu, potret kualitas SDM yang komprehensif terutama pada penduduk kelas menengah di Indonesia menjadi hal krusial untuk mendukung penyusunan kebijakan dan upaya ke depan. Beberapa aspek penting dalam peningkatan kualitas SDM khususnya pada penduduk kelas menengah akan dibahas pada tulisan ini.

Penduduk Kelas Menengah Bawah, Mayoritas yang Terabaikan

Menurut data SUSENAS 2021, 69 dari 100 penduduk Indonesia adalah penduduk berpendapatan menengah bawah (Gambar 2). Hal ini cukup membuktikan bahwa Indonesia didominasi oleh penduduk kelas menengah¹.



Sumber : Susenas 2021, diolah

Gambar 2 Distribusi penduduk Indonesia menurut kelas pendapatan tahun 2021

1 Kelompok penduduk menurut kelas pendapatan pada tulisan ini didasarkan pada data SUSENAS 2021. Karena SUSENAS tidak menghasilkan data pendapatan, nilai pendapatan yang dimaksud pada tulisan ini didekati dengan nilai pengeluaran perkapita. Penentuan batas kelas pendapatan menggunakan ketentuan World Bank yaitu GNI perkapita tahun 2021 yang dikonversi menjadi Rupiah/bulan menurut kurs dolar PPP yang berlaku pada tahun 2021 agar dapat diaplikasikan pada data SUSENAS.

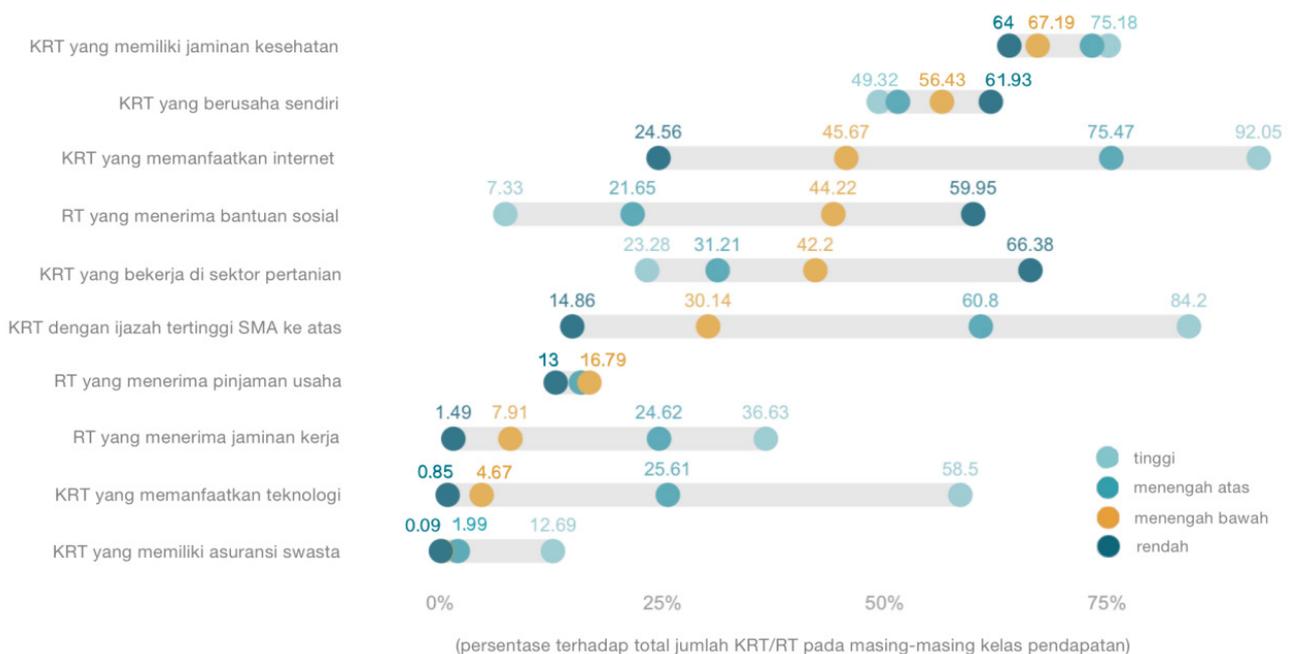
Menurut Larson dkk (2016), besarnya populasi penduduk kelas menengah di negara berkembang – termasuk Indonesia – didorong salah satunya oleh pesatnya proses transformasi struktural di negara tersebut [6]. Transformasi struktural pada dasarnya adalah proses perubahan ekonomi dari sektor pertanian yang bersifat labor-intensive ke sektor industri maupun jasa yang lebih skill-intensive [7-9]. Dilihat dari sisi jumlah angkatan kerja yang dihasilkan, penduduk kelas menengah dapat menjadi potensi ekonomi bagi Indonesia. Namun di sisi lain, penduduk mayoritas ini tampaknya masih belum seluruhnya menikmati hak kebutuhan dasar pembangunan manusia.

Gambar 3 memotret kondisi setiap kelas pendapatan di Indonesia menurut beberapa indikator sosial. Sejalan dengan pendapat Larson, proses transformasi struktural tampaknya mulai terjadi di Indonesia. Adanya proses transformasi struktural ditunjukkan oleh bukti empiris bahwa rumah tangga pada sektor pertanian tidak lagi mendominasi kelompok penduduk berpendapatan

menengah bawah dan menengah atas. Kurang dari sepertiga dari total kepala rumah tangga (KRT) pada kelas pendapatan menengah atas dan 42 persen KRT pada kelas pendapatan menengah bawah yang bekerja di sektor pertanian. Meski demikian, proses transformasi struktural tampak belum bisa menjamin sepenuhnya kesejahteraan penduduk berpendapatan menengah khususnya pada kelompok menengah bawah. Mengapa hal ini terjadi akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

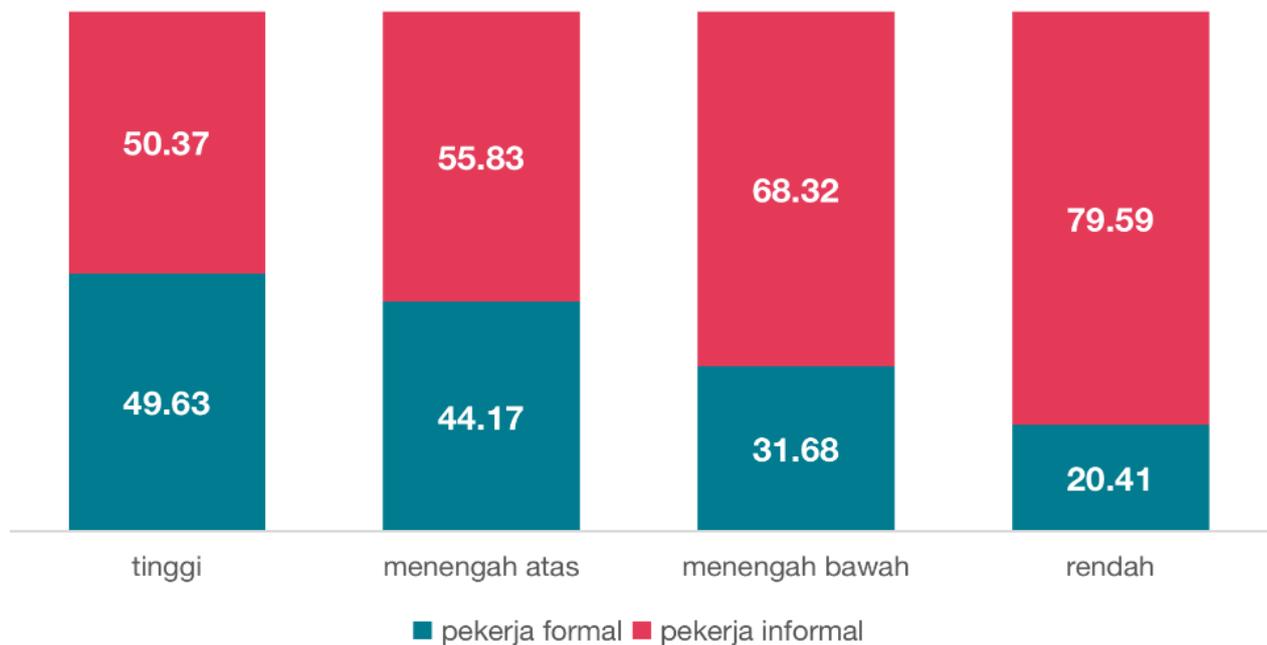
Terabaikan dari Akses Pendidikan dan Teknologi

Gambar 3 memperlihatkan secara jelas adanya kesenjangan antara kelompok penduduk berpendapatan menengah bawah dan kelompok penduduk berpendapatan menengah atas/tinggi terhadap akses pendidikan serta pemanfaatan teknologi dan internet. Berbeda dengan kelompok penduduk berpendapatan menengah atas dan tinggi dimana sebagian besar penduduknya telah menikmati akses terhadap pendidikan tinggi dan internet, tercatat kurang dari



Sumber : Susenas 2021, diolah

Gambar 3 Persentase Rumah Tangga/Kepala Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Sosial pada Setiap Kelas Pendapatan



Sumber : Susenas 2021, diolah

Gambar 4 Distribusi Jenis Usaha Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan

separuh KRT pada kelompok penduduk berpendapatan menengah bawah yang menamatkan jenjang pendidikan SMA ke atas (30,14%) dan memanfaatkan internet (45,67%). Lebih lanjut, hanya 4,67 persen KRT pada kelompok ini yang memanfaatkan teknologi seperti komputer, laptop, dan tablet. Padahal, kualifikasi pendidikan dan literasi digital sangat dibutuhkan pada era ini untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di dunia kerja [10]. Rendahnya kemampuan untuk mengakses pendidikan dan teknologi terlihat dari jenis lapangan usaha yang digeluti oleh KRT pada kelompok berpendapatan menengah bawah. Walaupun lebih dari setengah KRT pada ke kelompok berpendapatan menengah bawah tidak bekerja di sektor pertanian, data SUSENAS mencatat sebanyak 68 persen KRT pada kelas menengah bawah adalah pekerja informal dimana umumnya bidang ini tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus (Gambar 4). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa proses transformasi struktural baru terjadi pada lapisan lapangan usaha informal sehingga dari sisi pendapatan dirasa kurang signifikan

dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini menjawab premis sebelumnya bahwa transformasi struktural belum menjamin kesejahteraan kelompok berpendapatan menengah bawah.

Terabaikan Dari Akses Perlindungan Sosial

Kesenjangan selanjutnya yang tampak pada Gambar 3 adalah akses pada perlindungan sosial. Memang secara umum program jaminan kesehatan dari pemerintah (BPJS) telah menjangkau lebih dari 60 persen rumah tangga di semua kelompok pendapatan. Namun, hanya 7,9 persen rumah tangga di kelompok berpendapatan menengah bawah yang mendapatkan jaminan pekerjaan seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, pesangon, jaminan kecelakaan, dan asuransi kantor. Hal ini tampaknya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya dimana penduduk kelompok berpendapatan menengah bawah sebagian besar bekerja pada lapangan usaha informal sehingga berefek pada jaminan pekerjaan yang diterima menjadi lebih kecil. Lebih lanjut, data SUSENAS mencatat bahwa kurang dari separuh rumah tangga pada

kelompok berpendapatan menengah bawah mendapatkan bantuan sosial. (Gambar 3)

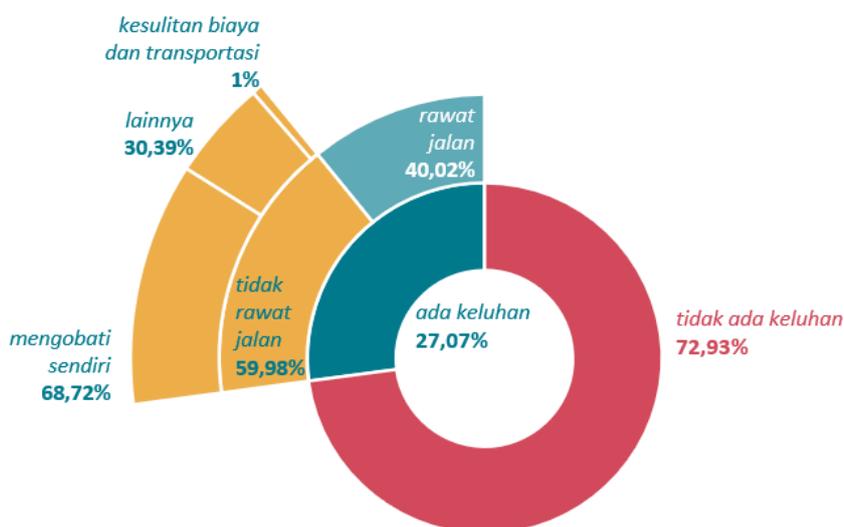
Terabaikan Dari Akses Kesehatan

Penduduk kelompok berpendapatan menengah bawah ternyata masih berpotensi menjadi kelompok yang memiliki kesulitan menikmati akses kebutuhan dasar manusia, seperti akses kesehatan. Tercatat bahwa dari 27 persen penduduk berpendapatan menengah bawah yang mengalami keluhan kesehatan, hampir 60 persennya tidak melakukan rawat jalan. Menelisik lebih dalam, dari 100 penduduk berpendapatan menengah bawah yang tidak melakukan rawat jalan ternyata ada 68 orang yang memilih untuk mengobati sendiri dan masih ditemukan 1 orang yang tidak melakukan rawat jalan karena kesulitan biaya dan transportasi (Gambar 5). Kondisi ini sepertinya sesuai dengan pernyataan Roman (2019) yang mengatakan bahwa penduduk berpendapatan menengah tidak serta merta diterjemahkan sebagai penduduk yang berpenghasilan aman karena masih berisiko mengalami deprivasi [11]. Oleh karena itu, akses terhadap perlindungan sosial, kesehatan, dan pekerjaan seperti dijabarkan pada bagian sebelumnya menjadi penting

untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada kelompok penduduk berpendapatan menengah bawah.

Membangun Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, Membangun Jembatan Kesejahteraan

Dartanto(2019)menyatakanbahwainvestasi pada kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan adalah salah satu kunci untuk mendorong pembangunan Indonesia [12]. Investasi ini, jika berjalan dengan baik, berpotensi mengeluarkan Indonesiadarijebakannegaraberpendapatan menengah. Untuk mencapai hal tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas dan akses kepada kedua hal tersebut menjadi hal yang esensial. Menurut Aviliani (2014), progres infrastruktur kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia tergolong lambat [13]. Berdasarkan IMD World Talent Ranking, pada tahun 2022 Indonesia masih menempati peringkat ke 37 dari 64 negara di dunia dalam hal penyediaan infrastruktur kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan



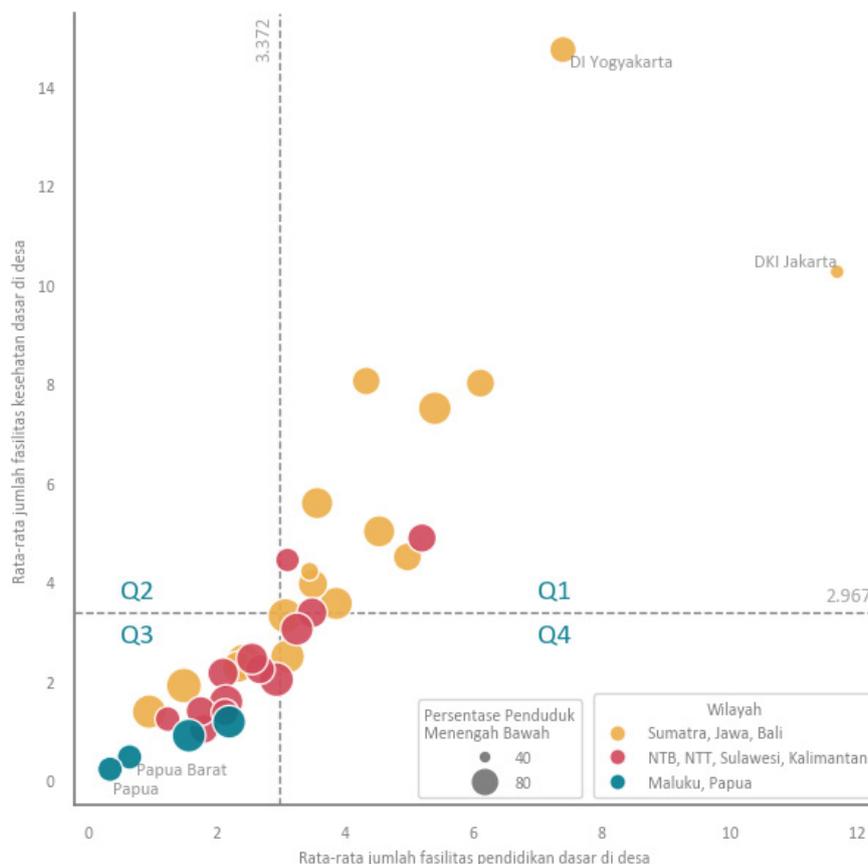
Sumber : Susenas 2021, diolah

Gambar 5 Sebaran Penduduk Kelompok Berpendapatan Menengah Bawah yang Memiliki Keluhan Kesehatan

masyarakat. Selain itu, pada aspek kesiapan (readiness) Indonesia masih menempati posisi ke 38 dalam hal penyediaan pendidikan dasar dan menengah untuk mendukung daya saing ekonomi [14].

Ketika membicarakan upaya percepatan pembangunan pada aspek kesehatan dan pendidikan, kesenjangan pembangunan infrastruktur regional tampaknya masih menjadi isu utama yang belum terselesaikan. Gambar 6 menyajikan sebaran fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas pendidikan dasar seluruh provinsi di Indonesia. Dapat diprediksi bahwa provinsi-provinsi pulau Jawa, Sumatera, dan Bali memiliki jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar per desa relatif lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi di bagian tengah dan timur Indonesia. Wilayah-wilayah di provinsi bagian timur Indonesia seperti Maluku dan Papua serta sebagian besar

wilayah di provinsi NTB, NTT, Sulawesi, dan Kalimantan terindikasi masuk ke dalam kuadran 3 (Q3) yang artinya memiliki jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar per desa lebih sedikit dari rata-rata nasional jumlah infrastruktur per desa. Provinsi-provinsi pada Q3 ini dapat diartikan sebagai provinsi prioritas percepatan pembangunan infrastruktur regional. Dikaitkan dengan penduduk berpendapatan menengah bawah, terlihat bahwa persentase penduduk berpendapatan menengah bawah di provinsi-provinsi pada Q3 pun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi Q1. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan perlunya infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mendorong Indonesia keluar dari jerat negara berpendapatan menengah.



Sumber : Susenas dan Wilkerstat 2021, diolah

Gambar 6 Rata-rata Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan per Desa dan Persentase Penduduk Menengah Bawah Menurut Provinsi

Kesimpulan

Hampir tiga dekade Indonesia terjatuh pada kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Data SUSENAS 2021 mencatat 69 dari 100 penduduk Indonesia adalah penduduk berpendapatan menengah bawah. Besarnya populasi penduduk kelas menengah di Indonesia didorong oleh pesatnya proses transformasi struktural. Namun demikian, proses transformasi struktural sepertinya belum dapat menjamin sepenuhnya kesejahteraan kelompok berpendapatan menengah bawah. Kelompok berpendapatan menengah bawah di Indonesia tercatat masih kesulitan menikmati akses pendidikan dan teknologi, kesehatan, dan perlindungan sosial maupun jaminan pekerjaan. Selain itu, kelompok berpendapatan menengah bawah juga bukan merupakan kelompok yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan sosial karena dianggap berada di atas garis kemiskinan.

Indonesia sedang menikmati kondisi bonus demografi karena memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Banyaknya penduduk usia produktif dapat berpotensi menjadi aset jika diimbangi dengan kualitas SDM yang baik. Hal ini dikarenakan kualitas SDM adalah kunci dalam upaya untuk keluar dari belenggu kelas menengah. Untuk mencapai hal tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur pada aspek pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas dan akses ke kedua aspek tersebut menjadi hal yang esensial. Provinsi-provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia adalah provinsi yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur regional karena jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar per desa di provinsi-provinsi tersebut masih di bawah rata-rata nasional jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan per desa.

Referensi

- [1] Fentom, Neil., & Serajuddin, Umar. (2016). The World Bank's Classification of Countries by Income. Policy Research Working Paper 7528. The World Bank Group. DOI : <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7528>
- [2] The World Bank. How are the income group thresholds determined?. Diakses pada 19 Juni 2023. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined>
- [3] The World Bank. World Bank Country and Lending Groups. Diakses pada 19 Juni 2023. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>
- [4] Badan Pusat Statistik. (Juni, 2022). Analisis Profil Penduduk Indonesia.
- [5] Bahrain, Roziana., et. al. (2019). Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia. *Iranian Journal of Management Studies (IJMS)* Vol. 13, No. 1, Winter 2020. DOI : 10.22059/ijms.2019.280284.673616
- [6] Larson, Greg., Loayza, Norman., & Woolcock, Michael. (2016). The Middle-Income Tra: Myth or Reality?. *Research and Policy Briefs From The World Bank Malaysia Hub*
- [7] E. Zahrotul Awaliyyah, S.-E. Chen, & R. Anindita. (2020). Analysis of Structural Transformation of Labor from Agriculture to Non-Agriculture in Asia. *Agricultural Socio-Economics Journal*, vol. XX, no. 4, pp. 335–341, 2020, doi: 10.21776/ub.agrise.2020.020.4.9.
- [8] L. Schlogl., & A. Sumner,. (2020). Rethinking International Development Series: Disrupted Development and the Future of Inequality in the Age of Automation. [Online]. Available: <http://www.palgrave.com/gp/series/14501>
- [9] UN-Habitat. (2016). Structural transformation in developing countries: Cross Regional Analysis.
- [10] Wicht, Alexandra., et. al. (2019). The Interplay between Education, Skills, and Job Quality. *Social Inclusion*, 2019, Volume 7, Issue 3, Pages 254–269. DOI: 10.17645/si.v7i3.2052
- [11] Roman, Orlando Zambrano. (2019). An Emerging but Vulnerable Middle Class: A Description of Trends in Asia and The Pacific. *Asia-Pacific Sustainable Development Journal*. Vol. 27, No. 1
- [12] Dartanto, Teguh., et. al. (2019). Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition from Poverty to the Middle Class in 1993–2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Volume 56, 2020
- [13] Aviliani., et.al. (2014). Addressing the Middle-Income Trap: Experience of Indonesia. *Asian Social Science*; Vol. 10, No. 7; 2014
- [14] IMD. (2022). IMD World Talent Ranking 2022. IMD World Competitiveness Center



DATAin adalah artikel yang memanfaatkan sumber data alternatif dan statistik resmi untuk memberikan gagasan yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi.

Pembaca dipersilakan mengutip artikel **DATAin** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

Redaksi **DATAin**

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
Badan Pusat Statistik

 bigdata.bps.go.id

 pms@bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bps@bps.go.id

Penanggungjawab Pelaksana

Dr. Muchammad Romzi
Direktur Analisis dan
Pengembangan Statistik

Reviewer

Dr. Suhariyanto
Kepala BPS Periode 2016-2021

Editor

Usman Bustaman S.Si, M.Sc.
Khairunnisah SST, M.S.E

Penulis

Dhiar Niken Larasati, SST, M.E.
Ranu Yulianto SST

Tata Letak

Nensi Fitria Deli, SST
Maulana Faris, SST
I N. Setiawan, S.Tr.Stat

